



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI F NOMOR 872**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN ... /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan... /

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. Alokasi Minimal yang dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud

pada.... /

pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Tambahan penghasilan sekretaris Desa yang PNS;
- c. Tunjangan jabatan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa
- e. Biaya BPJS Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- f. Biaya operasional pemerintahan Desa.

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(5) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) di

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa Tahun 2022.
- (2) Sumber data dalam penghitungan pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu

Alokasi... /

Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;

b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa paling cepat bulan Juli.

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap I tahun berjalan dari kepala Desa.
- (5) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ... /

pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap tahap dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 20 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI F NOMOR

072

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	012	SIMANINDO						
1	1217012001	TOMOK	358,627,080	4,699,000	363,326,080	101,735,800	42,258,300	507,320,180
2	1217012002	SIHUSAPI	336,371,880	5,038,000	341,409,880	12,981,900	5,392,300	359,784,080
3	1217012003	MADUMA	336,371,880	5,237,000	341,608,880	15,174,400	6,303,000	363,086,280
4	1217012004	DOSROHA	336,371,880	4,703,000	341,074,880	34,345,600	14,266,200	389,686,680
5	1217012005	AMBARITA	336,371,880	2,463,000	338,834,880	20,772,900	8,628,500	368,236,280
6	1217012006	MARTOBA	336,371,880	4,071,000	340,442,880	29,511,800	12,258,400	382,213,080
7	1217012007	GAROGA	336,371,880	3,577,000	339,948,880	16,811,600	6,983,100	363,743,580
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	336,371,880	3,679,000	340,050,880	15,591,300	6,476,200	362,118,380
9	1217012009	CINTA DAME	358,627,080	6,308,000	364,935,080	18,938,800	7,866,600	391,740,480
10	1217012010	HUTAGINJANG	358,627,080	6,845,000	365,472,080	16,213,000	6,734,400	388,419,480
11	1217012011	PARDOMUAN	336,371,880	3,118,000	339,489,880	19,718,800	8,190,600	367,399,280
12	1217012012	PARMONANGAN	336,371,880	3,773,000	340,144,880	13,591,500	5,645,500	359,381,880
13	1217012013	PARBALOHAN	386,371,880	3,777,000	390,148,880	13,183,400	5,476,000	408,808,280
14	1217012014	TANJUNGAN	336,371,880	5,273,000	341,644,880	13,165,000	5,468,400	360,278,280
15	1217012015	SIMARMATA	336,371,880	2,659,000	339,030,880	70,460,200	29,267,200	438,758,280
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	354,371,880	3,983,000	358,354,880	18,949,700	7,871,200	385,175,780
17	1217012018	MARLUMBA	354,371,880	3,588,000	357,959,880	35,130,300	14,592,100	407,682,280
18	1217012019	SIMANINDO	354,371,880	3,097,000	357,468,880	27,913,500	11,594,500	396,976,880
19	1217012020	UNJUR	354,371,880	2,729,000	357,100,880	189,377,600	78,662,300	625,140,780
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	354,371,880	2,728,000	357,099,880	30,205,600	12,546,600	399,852,080
	JUMLAH		6,934,203,200	81,345,000	7,015,548,200	713,772,700	296,481,400	8,025,802,300
	022	ONAN RUNGGU						
21	1217022001	PAKPAHAN	336,371,880	3,601,000	339,972,880	12,335,600	5,123,900	357,432,380
22	1217022002	HUTA HOTANG	336,371,880	5,131,000	341,502,880	13,741,600	5,707,900	360,952,380
23	1217022003	SITINJAK	336,371,880	5,184,000	341,555,880	14,803,900	6,149,100	362,508,880
24	1217022004	PARDOMUAN	336,371,880	4,826,000	341,197,880	13,771,200	5,720,100	360,689,180
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	336,371,880	4,476,000	340,847,880	11,942,400	4,960,500	357,750,780
26	1217022006	RINA BOLAK	334,244,280	4,498,000	338,742,280	13,880,000	5,765,300	358,387,580
27	1217022007	ONAN RUNGGU	334,244,280	4,118,000	338,362,280	12,688,000	5,270,200	356,320,480
28	1217022008	SITAMIANG	336,371,880	3,295,000	339,666,880	12,177,600	5,058,200	356,902,680
29	1217022009	JANJI MATOGU	336,371,880	4,076,000	340,447,880	12,242,800	5,085,300	357,775,980
30	1217022010	SILIMA LOMBU	309,619,020	3,828,000	313,447,020	11,605,795	4,824,629	329,877,444
31	1217022011	SIPIRA	358,627,080	7,507,000	366,134,080	15,219,300	6,321,700	387,675,080
32	1217022012	HARIAN	334,244,280	5,437,000	339,681,280	12,423,100	5,160,200	357,264,580
	JUMLAH		4,025,582,100	55,977,000	4,081,559,100	156,831,295	65,147,029	4,303,537,424
	032	NAINGGOLAN						
33	1217032001	PANGALOAN	336,371,880	3,660,000	340,031,880	15,076,800	6,262,500	361,371,180
34	1217032002	HUTARIHIT	436,371,880	5,411,000	441,782,880	12,008,800	4,988,100	458,779,780
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	336,371,880	5,006,000	341,377,880	13,178,500	5,474,000	360,030,380
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	336,371,880	6,033,000	342,404,880	12,937,800	5,374,000	360,716,680
37	1217032005	PANANGGANGAN	336,371,880	6,052,000	342,423,880	12,474,300	5,181,500	360,079,680
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	337,219,020	3,379,000	340,598,020	12,981,900	5,392,300	358,972,220
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	336,371,880	4,233,000	340,604,880	12,139,900	5,042,600	357,787,380
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	336,371,880	3,050,000	339,421,880	12,516,700	5,199,100	357,137,680
41	1217032009	NAINGGOLAN	336,371,880	3,200,000	339,571,880	31,159,400	12,942,800	383,674,080
42	1217032010	PASARAN I	336,371,880	2,948,000	339,319,880	12,314,300	5,115,000	356,749,180
43	1217032013	PANANGGANGAN II	354,371,880	6,036,000	360,407,880	12,276,700	5,099,400	377,783,980
44	1217032014	SIPINGGAN	354,371,880	4,141,000	358,512,880	13,003,500	5,401,300	376,917,680
45	1217032015	JANJI MARAPOT	354,371,880	4,802,000	359,173,880	12,215,700	5,074,000	376,463,580
	JUMLAH		4,527,681,580	57,951,000	4,585,632,580	184,284,300	76,546,600	4,846,463,480

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	042	PALIPI						
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	307,491,420	3,931,000	311,422,420	11,996,800	4,983,100	328,402,320
47	1217042002	GORAT PALLOMBUAN	336,371,880	3,738,000	340,109,880	12,510,500	5,196,500	357,816,880
48	1217042003	URAT II	336,371,880	5,734,000	342,105,880	12,878,100	5,349,200	360,333,180
49	1217042004	PALIPI	358,627,080	3,734,000	362,361,080	13,704,000	5,692,200	381,757,280
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	337,219,020	6,836,000	344,055,020	11,801,600	4,902,000	360,758,620
51	1217042006	HATOGUAN	386,371,880	4,477,000	390,848,880	12,295,100	5,107,000	408,250,980
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	341,474,220	7,026,000	348,500,220	19,021,200	7,900,900	375,422,320
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	336,371,880	4,433,000	340,804,880	18,485,900	7,678,500	366,969,280
54	1217042009	URAT TIMUR	309,619,020	3,496,000	313,115,020	12,358,800	5,133,500	330,607,320
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	358,627,080	5,758,000	364,385,080	13,784,500	5,725,700	383,895,280
56	1217042011	PARSAORAN URAT	336,371,880	2,923,000	339,294,880	14,575,700	6,054,300	359,924,880
57	1217042012	HUTAGINJANG	310,466,160	5,396,000	315,862,160	12,218,700	5,075,300	333,156,160
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	358,627,080	7,267,000	365,894,080	16,195,600	6,727,200	388,816,880
59	1217042018	HUTADAME	354,371,880	3,694,000	358,065,880	12,047,600	5,004,200	375,117,680
60	1217042019	PALLOMBUAN	354,371,880	2,027,000	356,398,880	20,766,900	8,626,000	385,791,780
61	1217042020	PAMUTARAN	327,619,020	5,897,000	333,516,020	11,742,900	4,877,700	350,136,620
62	1217042021	SIDEAK	354,371,880	4,978,000	359,349,880	12,264,100	5,094,100	376,708,080
	JUMLAH		5,804,745,140	81,345,000	5,886,090,140	238,648,000	99,127,400	6,223,865,540
	052	HARIAN						
63	1217052001	SOSOR DOLOK	309,619,020	2,763,000	312,382,020	11,863,000	4,927,500	329,172,520
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	336,371,880	12,500,000	348,871,880	17,142,000	7,120,300	373,134,180
65	1217052003	HARIARA POHAN	334,244,280	3,285,000	337,529,280	16,140,700	6,704,400	360,374,380
66	1217052004	DOLOK RAJA	336,371,880	3,138,000	339,509,880	11,749,200	4,880,300	356,139,380
67	1217052006	SAMPUR TOBA	336,371,880	3,724,000	340,095,880	13,396,700	5,564,600	359,057,180
68	1217052007	SIPARMAHAN	336,371,880	5,073,000	341,444,880	12,532,800	5,205,700	359,183,380
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	336,371,880	2,295,000	338,666,880	12,416,500	5,157,400	356,240,780
70	1217052009	TURPUK SAGALA	309,619,020	2,325,000	311,944,020	12,131,800	5,039,200	329,115,020
71	1217052010	TURPUK MALAU	409,619,020	2,599,000	412,218,020	12,075,100	5,015,600	429,308,720
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	309,619,020	2,388,000	312,007,020	18,254,600	7,582,400	337,844,020
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	309,619,020	2,840,000	312,459,020	93,105,800	38,673,600	444,238,420
74	1217052014	HUTAGALUNG	354,371,880	9,595,000	363,966,880	12,753,000	5,297,200	382,017,080
75	1217052015	HARIARA PINTU	354,371,880	13,846,000	368,217,880	13,998,200	5,814,400	388,030,480
	JUMLAH		4,372,942,540	66,371,000	4,439,313,540	257,559,400	106,982,600	4,803,855,540
	062	SIANJUR MULA MULA						
76	1217062001	HUTA GINJANG	336,371,880	4,621,000	340,992,880	12,281,600	5,101,400	358,375,880
77	1217062002	SINGKAM	367,671,880	4,292,000	371,963,880	11,948,600	4,963,100	388,875,580
78	1217062003	HASINGGAAN	337,219,020	7,396,000	344,615,020	12,086,600	5,020,400	361,722,020
79	1217062004	AEK SIPTUDAI	336,371,880	3,508,000	339,879,880	14,817,500	6,154,700	360,852,080
80	1217062005	HUTA GURGUR	336,371,880	5,038,000	341,409,880	12,365,800	5,136,400	358,912,080
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	336,371,880	4,302,000	340,673,880	11,986,200	4,978,700	357,638,780
82	1217062007	BOHO	336,371,880	5,268,000	341,639,880	12,398,000	5,149,800	359,187,680
83	1217062008	SIBORO	336,371,880	4,076,000	340,447,880	12,444,600	5,169,100	358,061,580
84	1217062009	SARIMARRIHIT	336,371,880	4,202,000	340,573,880	12,074,700	5,015,500	357,664,080
85	1217062010	GINOLAT	319,219,020	3,669,000	322,888,020	12,100,600	5,026,200	340,014,820
86	1217062011	BONAN DOLOK	336,371,880	4,480,000	340,851,880	12,127,900	5,037,600	358,017,380
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	354,371,880	3,881,000	358,252,880	12,027,800	4,996,000	375,276,680
	JUMLAH		4,069,456,840	54,733,000	4,124,189,840	148,659,900	61,748,900	4,334,598,640
	072	RONGGUR NIHUTA						
88	1217072001	SALAON TOBA	336,371,880	4,008,000	340,379,880	13,177,900	5,473,700	359,031,480
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	358,627,080	6,487,000	365,114,080	12,345,300	5,127,900	382,587,280
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	336,371,880	4,423,000	340,794,880	12,420,900	5,159,300	358,375,080
91	1217072004	SALAON DOLOK	336,371,880	7,003,000	343,374,880	13,047,400	5,419,500	361,841,780
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	358,627,080	8,274,000	366,901,080	13,127,000	5,452,600	385,480,680
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	336,371,880	4,866,000	341,237,880	12,881,800	5,350,700	359,470,380
94	1217072007	PARADUAN	336,371,880	6,869,000	343,240,880	12,996,400	5,398,300	361,635,580
95	1217072008	SIJAMBUR	358,627,080	6,945,000	365,572,080	13,003,600	5,401,300	383,976,980
	JUMLAH		2,757,740,640	48,875,000	2,806,615,640	103,000,300	42,783,300	2,952,399,240

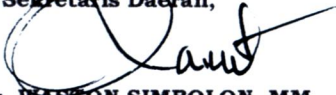
NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		TOTAL
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
	082	PANGURURAN						
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	309,619,020	5,039,000	314,658,020	12,475,900	5,182,100	332,316,020
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	358,627,080	4,469,000	363,096,080	26,813,500	11,137,600	401,047,180
98	1217082003	PARBABA DOLOK	336,371,880	6,109,000	342,480,880	14,927,100	6,200,300	363,608,280
99	1217082004	HUTA TINGGI	336,371,880	4,286,000	340,657,880	17,046,700	7,080,700	364,785,280
100	1217082005	PARHORASAN	336,371,880	5,766,000	342,137,880	12,158,600	5,050,300	359,346,780
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	309,619,020	4,581,000	314,200,020	12,458,500	5,174,900	331,833,420
102	1217082007	PARSAORAN I	336,371,880	2,586,000	338,957,880	23,439,000	9,735,900	372,132,780
103	1217082008	RIANIATE	358,627,080	6,761,000	365,388,080	14,775,600	6,137,300	386,300,980
104	1217082009	HUTA BOLON	309,619,020	2,109,000	311,728,020	16,988,800	7,056,700	335,773,520
105	1217082010	PANAMPANGAN	309,619,020	3,731,000	313,350,020	16,916,600	7,026,700	337,293,320
106	1217082011	PARDUGUL	309,619,020	2,896,000	312,515,020	13,777,900	5,722,900	332,015,820
107	1217082012	HUTA NAMORA	358,627,080	5,577,000	364,204,080	17,308,600	7,189,500	388,702,180
108	1217082013	PARLONDUT	309,619,020	2,958,000	312,577,020	15,014,900	6,236,800	333,828,720
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	358,627,080	4,454,000	363,081,080	13,250,500	5,503,900	381,835,480
110	1217082015	PARMONANGAN	336,371,880	4,496,000	340,867,880	12,849,300	5,337,200	359,054,380
111	1217082016	SAIT NIHUTA	309,619,020	1,974,000	311,593,020	14,772,000	6,135,900	332,500,920
112	1217082017	SITUNGKIR	309,619,020	1,852,000	311,471,020	12,644,500	5,252,100	329,367,620
113	1217082018	SIANTING-ANTING	309,619,020	3,558,000	313,177,020	14,615,500	6,070,800	333,863,320
114	1217082019	SIALANGUAN	309,619,020	2,213,000	311,832,020	14,319,000	5,947,700	332,098,720
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	340,919,020	3,141,000	344,060,020	13,793,000	5,729,200	363,582,220
116	1217082021	PARDOMUAN I	380,882,280	3,974,000	384,856,280	143,494,900	59,603,900	587,955,080
117	1217082022	SITOLU HUTA	309,619,020	2,779,000	312,398,020	21,447,000	8,908,500	342,753,520
118	1217082023	SINABULAN	309,619,020	3,501,000	313,120,020	12,640,900	5,250,700	331,011,620
119	1217082024	AEK NAULI	309,619,020	4,167,000	313,786,020	13,545,500	5,626,400	332,957,920
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	336,371,880	1,745,520	338,117,400	39,265,800	16,309,900	393,693,100
JUMLAH			8,199,588,160	94,722,520	8,294,310,680	540,739,600	224,607,900	9,059,658,180
	092	SITIOTIO						
121	1217092001	HOLBUNG	336,371,880	6,251,000	342,622,880	12,597,300	5,232,600	360,452,780
122	1217092002	JANJI RAJA	337,219,020	6,943,000	344,162,020	12,133,000	5,039,700	361,334,720
123	1217092003	SABULAN	336,371,880	6,183,000	342,554,880	12,125,800	5,036,700	359,717,380
124	1217092004	BUNTU MAULI	336,371,880	4,920,000	341,291,880	12,185,200	5,061,400	358,538,480
125	1217092005	TAMBA DOLOK	386,371,880	6,077,000	392,448,880	12,469,400	5,179,400	410,097,680
126	1217092006	CINTA MAJU	336,371,880	5,220,000	341,591,880	12,200,600	5,067,800	358,860,280
127	1217092007	PARSAORAN	354,371,880	5,414,000	359,785,880	12,011,600	4,989,300	376,786,780
128	1217092008	JANJIMARIA	354,371,880	5,793,000	360,164,880	12,087,600	5,020,800	377,273,280
JUMLAH			2,777,822,180	46,801,000	2,824,623,180	97,810,500	40,627,700	2,963,061,380
TOTAL			43,469,762,380	588,120,520	44,057,882,900	2,441,305,995	1,014,052,829	47,513,241,724

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T GULTOM

Diundangkan di Pangururan,
pada tanggal 20 Februari 2023
Pj. Sekretaris Daerah,


Drs. WASTON SIMBOLON, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI F NOMOR 872